

HIGHLIGHT

Perubahan pemerintahan pada 1 dan 2 Oktober mencakup kabinet, Polri, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Sejumlah pejabat tidak keluar dari pemerintahan, tetapi berpindah posisi. Sugiono berpindah dari Menteri Luar Negeri menjadi Menko PMK, Dudung Abdurachman dari KSP menjadi Menko Polkam, sedangkan Listyo Sigit Prabowo berpindah dari Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Bahlil Lahadalia memperoleh jabatan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sambil tetap memimpin Kementerian ESDM. Presiden kemudian mengangkat 26 anggota Wantimpres pada 2 Oktober.

Perubahan tersebut menghasilkan tiga isu kebijakan yang dapat diukur. Pertama, konsentrasi fungsi koordinasi dan pelaksana pada sektor hilirisasi dan energi. Kedua, perubahan pembagian kerja antara Menko Polkam, KSP, dan Polri setelah tiga posisi tersebut berganti secara bersamaan. Ketiga, perluasan Wantimpres menjadi 26 anggota tanpa informasi publik yang setara mengenai pembagian bidang dan mekanisme kerjanya. Dampak reshuffle lebih tepat dinilai melalui perubahan kewenangan dan proses keputusan daripada jumlah pejabat yang berganti.

ANALISIS

KONSENTRASI KEWENANGAN HILIRISASI DAN ENERGI

Penempatan Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM menggabungkan fungsi koordinasi lintas kementerian dengan kendali atas salah satu kementerian teknis terbesar di bawah koordinasi tersebut. Pemerintah menjelaskan bahwa sebagian besar investasi hilirisasi berada di sektor ESDM. Konfigurasi ini dapat memperpendek jalur keputusan untuk proyek berbasis mineral dan energi, sekaligus menempatkan satu pejabat sebagai koordinator dan pelaksana kebijakan.

Dampaknya dapat diperiksa melalui tiga keluaran. Pertama, aturan pembagian kewenangan antara Kemenko baru, ESDM, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Kedua, mekanisme penyelesaian perbedaan kebijakan antara kementerian teknis. Ketiga, kementerian yang memegang keputusan akhir atas proyek hilirisasi lintas sektor. Jika ketiga aspek tersebut tidak berubah secara formal, pembentukan Kemenko baru terutama menghasilkan konsentrasi jabatan tanpa perubahan yang dapat diukur pada tata kelola kebijakan.

KAPOLRI DAN RANTAI KOORDINASI KEAMANAN

Komisi III DPR menyetujui Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober secara aklamasi, kemudian persetujuan dibawa ke rapat paripurna pada hari yang sama. Kecepatan proses tidak menunjukkan pelanggaran dengan sendirinya. Variabel yang lebih relevan adalah kedalaman materi yang diperiksa DPR sebelum memberikan persetujuan.

Tiga dokumen menjadi indikator utama. Pertama, alasan formal pemberhentian Kapolri sebelumnya dalam usulan Presiden. Kedua, catatan uji kelayakan mengenai rekam jejak, agenda reformasi, dan target Kapolri baru. Ketiga, baseline untuk program 100 hari Suyudi yang memungkinkan hasilnya dibandingkan dengan kondisi sebelum pergantian. Tanpa tiga basis tersebut, publik hanya dapat mengukur penyelesaian prosedur, bukan kualitas pengawasan DPR.

Pergantian Kapolri juga berlangsung bersamaan dengan perpindahan Listyo ke KSP dan Dudung ke Menko Polkam. Konfigurasi ini mengubah tiga simpul koordinasi politik dan keamanan sekaligus. Dalam beberapa bulan berikutnya, perubahan dapat dilihat dari siapa yang memimpin koordinasi keamanan lintas lembaga, bagaimana laporan Polri sampai kepada Presiden, dan apakah KSP memperoleh fungsi keamanan yang berbeda setelah dipimpin mantan Kapolri.

WANTIMPRES DAN KAPASITAS KOORDINASI

Presiden mengangkat 26 anggota Wantimpres melalui Keppres Nomor 107/P Tahun 2026. Pratikno menjadi ketua, Hatta Rajasa wakil ketua, dan Muhammad Qodari sekretaris. Besarnya komposisi menambah kebutuhan pembagian kerja karena setiap anggota membawa latar belakang dan bidang pengalaman yang berbeda.

Efektivitas struktur tersebut dapat diuji melalui empat data. Pertama, pembagian portofolio 26 anggota. Kedua, jumlah dan struktur tenaga pendukung. Ketiga, pagu anggaran setelah lembaga beroperasi penuh. Keempat, mekanisme rapat dan penyusunan pertimbangan kepada Presiden. Ketiadaan pembagian portofolio akan membuat perluasan jumlah anggota sulit dibedakan dari sekadar penambahan struktur organisasi.

REKOMENDASI

Pengawasan pekan berikutnya dapat diarahkan pada tiga set data. Untuk sektor hilirisasi, telusuri aturan pembagian kewenangan antara Kemenko baru, ESDM, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta proyek pertama yang diputuskan melalui struktur tersebut. Untuk Polri, ukur keterbukaan alasan pemberhentian Kapolri lama, materi uji kelayakan Suyudi, dan baseline program 100 harinya. Untuk Wantimpres, catat pembagian portofolio, struktur sekretariat, pagu anggaran, dan mekanisme rapat.

Perubahan 1 dan 2 Oktober baru menghasilkan konfigurasi personel dan struktur baru. Dampak kebijakannya dapat dinilai setelah muncul bukti mengenai pembagian kewenangan, perubahan jalur koordinasi, dan keluaran kelembagaan dari masing-masing struktur.